

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang dewasa ini mengalami peningkatan dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2018 kuartal pertama mencapai angka 5,06 persen (BadanPusatStatistik, 2018).

Pertumbuhan ekonomi nasional ini tidak lepas dari pengaruh besarnya kontribusi pertumbuhan pendapatan daerahsetiap provinsi di Indonesia. Pendapatan daerah merupakan faktor utama yang merupakan pundi-pundi pemasukan untuk negara.

Tinggi pendapatan suatu daerah untuk negaranya dapat mendukung pembangunan nasional dalam berbagai aspek pembangunan nasional diantaranya meningkatkan mutu infrastruktur dan pembenahan sarana dan prasarana yang merupakan hal vital dalam pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara adil dan merata. Dalam pengukuran tinggi atau rendahnya suatu kinerja daerah dapat dilihat dari laporan daerah yang dapat mencerminkan kinerja daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh besarnya andil belanja modal daerah kabupaten/kota di Yogyakarta dapat diketahui melalui Laporan Realisasi Anggaran, sebagai contoh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2017 dimana menunjukkan persentase dari total belanja pemerintah daerah yang mana belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasi.

Berdasarkan data yang bersumber dari www.djpk.depkeu.go.id menunjukkan bahwa persentase total belanja daerah lebih rendah dibandingkan belanja operasi. Kabupaten Kulon

Progo hanya memperoleh alokasi belanja modal sebesar 39% sedangkan belanja operasinya sekitar 61%. Rendahnya porsi belanja modal daripada belanja operasi diindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal untuk anggaran sektor publik. Belanja modal merupakan pengeluaran modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya beban dalam pemeliharaan aset yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dari aset tersebut serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dalam membentuk karakter daerah yang mandiri (Mardiasmo, 2009).

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja terhadap APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik (Bastian, 2010).

Menurut Putro (2010) kecilnya alokasi belanja modal yang dianggarkan dengan dibandingkan dari total anggaran belanja daerah tidak cukup proposional. Sebaiknya, untuk belanja modal sebesar kurang dari 20%, sedangkan anggaran belanja tertinggi terdapat pada belanja pegawai yang mencapai 50% setiap tahunnya dari total anggaran belanja. Salah satu indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada penelitian ini adalah Rasio keuangan daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Halim, 2008). Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan

efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini,2011).

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah (Mahmudi, 2010). Untuk Rasio Keuangan Efektivitas daerah adalah dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (Ardhini,2011). Sehingga kemampuan dan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PADnya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah (Sularso,dkk, 2011). Rasio Keuangan Efisiensi Daerah adalah salah cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi (Ardhini, 2011).

Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi tinggi maka jumlah belanja

diindikasikan sangat tinggi (Mahmudi, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Salah satu indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sumber PAD terbesar adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain yang sah (Mardiasmo, 2004). Menurut Ardhani (2011) menunjukkan hasil secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selain pendapatan asli daerah, indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi, Desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mempunyai

keleluasaan dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir ini dengan judul **“PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH TAHUN BERJALAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti menjadi pedoman sekaligus menjadi arah dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?
2. Apakah rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?
3. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?
4. Apakah kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?
5. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?

6. Apakah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas daerah, rasio efisiensi daerah, kenaikan pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2014-2017.
2. Rasio Keuangan Daerah yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari rasio efektivitas keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari kenaikan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.

6. Untuk mengetahui pengaruh dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas daerah, rasio efisiensi daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menggunakan dan mempertimbangkan hasil dari penelitian ini dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan alokasi belanja modal daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bagi Akademis

Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna mengembangkan ilmu akuntansi keuangan sektor publik dan sebagai penambah wawasan dan topik kepustakaan bagi mahasiswa yang tertarik mempelajari akuntansi keuangan sektor publik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk memahami pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan daerah, kenaikan pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum daerah terhadap alokasi belanja modal daerah tahun berjalan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang : landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi uraian tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data termasuk prosedur analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisa data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penelitian.